

Daftar Isi Klipping Media Massa Tanggal 5 Agustus 2020

Sumber Pengambilan Dokumen

A		Provinsi Jawa Barat	
	1	Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Cair	<i>Pikiran Rakyat/Hal. 2</i>
	2	Rp 5 Juta - Rp 15 Juta Per Bulan	<i>Tribun Jabar/ Hal. 7</i>
B		Kota Bandung	
	1	Dikucurkan Bantuan Rp 2,4 Juta	<i>Galamedia/Hal. 2</i>

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Cair

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat/Hal. 2

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2020

Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Cair

BANDUNG, (PR).-

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan dalam dua hari ini insentif untuk tenaga kesehatan akan cair. Adapun insentif tersebut bersumber dari APBD provinsi melengkapi yang sudah ada dari APBN.

Anggaran untuk Covid-19 ini sudah disepakati secara rasional. Kalau masuk pandemi, ada dukungan dari APBN, untuk cover pembiayaan di rumah sakit juga biaya lain.

Terkait Covid, kami sudah sepakati, dalam dua hari ini, insentif untuk tenaga kesehatan akan dicairkan dari APBD provinsi melengkapi yang sudah ada dari APBN," ujar Ridwan Kamil, kemarin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Berli Hamdani Gelung Sakti memastikan, dana insentif untuk tenaga kesehatan di Jawa Barat yang menangani Covid-19 akan segera menerima dana insentif dari pemerintah pusat maupun Jawa Barat. Saat ini dana sebesar Rp 33 miliar sudah ada di kas daerah untuk dibagikan pada 41.000 tenaga kesehatan di Jabar.

"Untuk insentif tenaga kesehatan, tadi pagi kami juga sudah rapat lagi, khususnya Jawa Barat dengan kemen-

terian. Ya karena memang Jawa Barat ini pertama paling banyak jumlah 41.000 orang lebih yang akan mendapatkan insentif itu," ujar Berli kepada wartawan di Gedung Sate, pertengahan Juli lalu

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat inilah kita sudah ada kepastian (pencairan)," kata Berli menambahkan.

Menurut Berli, adapun besaran insentif tenaga kesehatan dari pusat itu seperti semula yaitu spesialisnya Rp 15 juta per bulan, kemudian dokter umum Rp 10 juta, dan untuk perawat, serta lain-lain Rp 5 juta per bulan.

Insentif dari APBD Jawa Barat, menurut dia, totalnya mencapai Rp 23 miliar. Sehingga, total insentif untuk

tenaga kesehatan di Jabar adalah Rp 33 miliar.

"Saat ini kami sedang membersihkan data *aja* karena uangnya sudah ditransfer kepada kami ada dari bantuan tambahan BOK (bantuan operasional kesehatan) sebesar Rp 10,7 miliar itu baru sudah kami terima makanya secepatnya akan dicairkan," kata Berli.

Dengan adanya dana dari pusat untuk Jabar, dana insentif untuk tenaga kesehatan pusat dan Jabar sebanyak Rp 33 miliar.

Rp 26 miliar

Sebelumnya, Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad melaporkan, pihaknya sudah menyiapkan Rp 26 miliar untuk insentif tenaga kesehatan di Jabar yang bertugas menangani pandemi Covid-19.

"Sebanyak Rp 23 miliar untuk insentif dan Rp 3 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi," ucap Daud dalam konferensi pers di Gedung Sate, beberapa waktu lalu.

Setiap tenaga kesehatan yang bertugas akan mendapatkan nominal insentif bervariasi, bergantung tingkat tugas yang dikerjakan. Juga, menyesuaikan tingkatan pekerjaan dan status pegawai negeri sipil (PNS) atau non-PNS.

Untuk tenaga dokter yang utama paling tinggi bisa mendapatkan Rp 630. Untuk perawat dan tenaga kesehatan lain bisa mendapat insentif di kisaran Rp 300.000-Rp 400.000 per hari. **(Novianti Nurulliah) *****

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA
BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Rp 5 Juta - Rp 15 Juta Per Bulan

Entitas / Cakupan : Provinsi Jawa Barat

Sumber / Hal : Tribun Jabar/ Hal. 7

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2020

Rp 5 Juta-Rp 15 Juta Per Bulan

- ▶ 41 Ribu Tenaga Kesehatan Jabar Dapat Insentif
- ▶ Mulai Cair Dua Hari ini

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

BANDUNG, TRIBUN - Para tenaga kesehatan yang selama ini menangani pasien Covid-19 di Jawa Barat akan mendapatkan insentif.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad mengatakan pihaknya sudah menyiapkan alokasi senilai Rp 26 miliar.

"Sebanyak Rp 23 miliar untuk insentif dan Rp 3 miliar untuk santunan kematian tenaga kesehatan yang gugur selama pandemi Covid-19," ucap Daud di Gedung Sate, Senin (3/8).

Pada bulan lalu, anggaran Pemprov Jabar untuk

penanggulangan Covid-19 sudah terserap sekitar Rp 1,423 triliun.

Serapan paling banyak untuk *social safety net* atau jaring pengaman sosial atau bantuan sosial (bansos).

"Untuk bansos Rp 1,158 triliun dan alat-alat kesehatan dasar Rp 248 miliar," katanya.

Di Jabar, tercatat sekitar 41 ribu tenaga kesehatan yang bertugas di garda terdepan merawat pasien yang terpapar virus korona.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dalam dua hari ini insentif bagi para tenaga kesehatan tersebut bisa mulai dicairkan.

"Akan kami cairkan dari APBD Provinsi Jabar, melengkapi yang sudah ada dari APBN," ujar gubernur yang akrab disapa Emil ini di Markas Kodam III Siliwangi, kemarin.

Menurut Emil, saat terjadi pandemi ini, ada dukungan dari APBN kepada daerah, di antaranya untuk memberikan pembiayaan perawatan di rumah sakit, juga biaya-biaya lain yang terkait Covid-19.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja, mengatakan selama ini pihaknya sudah men-data para tenaga kesehatan yang melakukan penanganan Covid-19.

"Insentif diberikan berdasarkan kriteria, jam kerja, jam pelayanan, dan sebagainya. Kali ini Dinas Kesehatan Jabar sedang menyusun itu semua, tapi seharusnya sudah selesai sehingga minggu ini keluar," katanya.

Pendataan selama ini di-

lakukan, untuk memastikan tenaga kesehatan yang mendapat insentif ini adalah tenaga kesehatan yang selama ini menangani kasus Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, mengatakan hal tersebut sudah dirapatkannya kembali bersama Kementerian Kesehatan RI, Selasa (14/7).

"Jawa Barat ini paling banyak tenaga kesehatannya, ada 41 ribuan lebih yang akan mendapatkan insentif itu. Kemudian juga rumah sakit ini paling banyak," katanya.

Berli mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mencairkan dana tersebut. Angka insentif dari pemerintah pusat, katanya, dokter spesialis akan mendapat Rp 15 juta per bulan, dokter umum Rp 10 juta per bulan, dan perawat serta tenaga lainnya Rp 5 juta per bulan.

"Jadi sedang membersihkan data saja karena uangnya sudah ditransfer ke kami. Ada dari bantuan tambahan dana operasional kesehatan (DOK) sebesar Rp 10,7 miliar, itu sudah kami terima, secepatnya akan kami cairkan dan sampaikan," katanya.

Insentif dari APBD Jawa Barat totalnya mencapai Rp 23 miliar. Jadi, total insentif untuk nakes di Jabar adalah Rp 33 miliar.

Insentif dari pemerintah pusat dan daerah tersebut diberikan sebagai apresiasi karena selama ini mereka telah berjuang merawat pasien yang terpapar virus korona. (**m syarif abdu-salam**)

MENANGANI KASUS COVID-19

- Dokter spesialis:
Rp 15 juta per bulan
- Dokter umum:
Rp 10 juta per bulan
- Perawat dan tenaga lain:
Rp 5 juta per bulan
- Jumlah tenaga kesehatan di Jabar: sekitar 41 ribu orang

ANGGARAN COVID-19 JABAR

- Insentif: Rp 26 miliar
- Insentif tenaga kesehatan:
Rp 23 miliar
- Santunan nakes yang gugur:
Rp 3 miliar

SERAPAN ALOKASI COVID-19

- Bansos: Rp 1,158 triliun
- Alat kesehatan dasar:
Rp 248 miliar

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Dikucurkan Bantuan Rp 2,4 Juta

Entitas / Cakupan : Kota Bandung

Sumber / Hal : Galamedia/Hal. 2

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2020

Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro

Dikucurkan Bantuan Rp 2,4 Juta

WASTUKANCANA, (GM).-

Pemerintah mengulirkan program pemulihan pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Pasalnya, selama pandemi Covid-19 ini tidak sedikit para pelaku usaha yang terdampak. Kota Bandung menandatangani kuota 75.000 pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

Menurut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinas KUMKM) Kota Bandung, Atet Dedi Handiman, program pemulihan pelaku usaha mikro dan ultra mikro ini berupa bantuan pembiayaan sebesar Rp 2,4 juta. Ini merupakan program Pemerintah Pusat melalui Pemprov Jabar. Dinas KUMKM Kota Bandung pun berupaya mendatta dan menyosialisasikan program tersebut kepada pelaku usaha mikro dan ultra mikro.

"Target Kota Bandung untuk bantuan ini 75.000 pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan secara hibah. Sampai saat ini per tanggal 4 agustus tercatat 2.375 pelaku usaha yang telah mendaftar," ungkap Atet saat Bandung Menjawab di Balai Kota Bandung, Jln. Wastukencana, Selasa (4/8).

Awalnya, kata Atet, program ini berupa bantuan rehabilitasi usaha senilai Rp 500.000 dan bantuan pembiayaan sebesar Rp 1 juta. Untuk bantuan pembiayaan ini nantinya diangsur selama satu tahun tanpa bunga. Namun, kemudian informasi terbaru jumlahnya sebesar Rp 2,4 juta.

"Dan semuanya hibah. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan dan bisa membantu pelaku usaha mikro dan ultra mikro,"

terangnya,

Kriterianya, kata Atet, pelaku usaha itu tidak berbadan hukum, tidak akses kredit ke bank atau lembaga pembiayaan, bukan wajib pajak dan bukan usaha di bidang industri manufaktur. Selain itu, memiliki usaha kegiatan mandiri dan memiliki rekening tabungan per juni kurang dari Rp2 juta.

"Syarat-syaratanya enggak ribet, tidak harus punya NPWP. Hanya harus memiliki Nomor Induk Kependudukan, KTP, alamat lengkap, nama usaha dan alamat usaha," ungkapnya.

Ditambahkan Kepala Bidang Usaha Mikro dan Fasilitas UKM, Eri Nurjaman, program ini awalnya digulirkan pada Juni dengan besaran sejumlah Rp1,5 juta per pelaku usaha.

"Konsep ini berupa pinjaman lunak sebesar Rp1 juta tidak ada bunga dengan pengembalian selama 12 bulan. Dan yang Rp500.000 berupa hibah. Namun kurang diminati pelaku usaha," ujarnya.

Kemudian pada awal Juli, programnya menjadi konsep hibah bantuan pembiayaan sebesar Rp2,4 juta. Diharapkan, pelaku usaha mikro dan ultra mikro bisa memanfaatkan dengan mendaftar sebagai penerima bantuan pembiayaan.

"Pendaftaran dapat dilakukan melalui email (fasilitasipembiayaanUM@gmail.com) dan aplikasi *Whatsapp* (ke nomor 081214056981/Yayat Priyatna ataupun bisa langsung datang ke kantor Dinas KUMKM Kota Bandung di Jalan Kawaluyaan No. 2," ujarnya. **(B.95)****